
BAB I

PENDAHULUAN

I.A. LATAR BELAKANG

1. Manula dalam Konteks Perkembangan Pola Hidup Baru

Kemajuan dan keberhasilan pembangunan di Indonesia telah memperpanjang usia, kualitas, dinamika serta kesiapan penduduk Indonesia untuk melaksanakan pembangunan, dengan berhasilnya pelaksanaan pembangunan nasional tersebut khususnya pada peningkatan umur harapan hidup penduduk, akan berdampak pada meningkatnya jumlah penduduk usia lanjut. Orang yang memasuki usia lanjut secara fisik maupun psikis akan mengalami perubahan, di mana berbagai permasalahan dialami sebagai akibat dari keterbatasan fisik, psikis, maupun sosial ekonominya. Dengan menurunnya fisik, psikis maupun sosial ekonomis ini biasanya orang mulai disebut berusia lanjut. Seorang disebut berusia lanjut apabila yang bersangkutan telah berusia 55 tahun ke atas, dan bila ia tidak mempunyai atau tidak berdaya untuk mencari nafkah sendiri bagi keperluan hidupnya sehari-hari dan tidak menerima nafkah dari orang lain disebut jompo (UU No.4 tahun 1965). Presentasi penduduk Indonesia yang berusia lanjut 55 tahun ke atas, dari data terlihat semakin bertambah pada tahun 1971-6,4%, tahun 1980-7,8 %, tahun 1990-9,2 %

dan diperkirakan pada tahun 2020 menjadi 11,4 % dari jumlah populasi (JEN, 1984). 1)

Dari data tersebut Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan presentase yang lebih tinggi, sensus tahun 1971-9,4 %, tahun 1980-12 % dan tahun 1990-14% ini jauh di atas angka rata-rata nasional. 2)

Menurut usia harapan hidup Daerah Istimewa Yogyakarta juga lebih tinggi dibandingkan angka harapan hidup nasional di mana angka harapan hidup nasional pria 59,70 sedangkan untuk DIY 66,3 dan untuk wanita angka harapan hidup nasional 61,5 sedangkan di untuk DIY 70,3. 3)

Dengan meningkatnya jumlah penduduk berusia lanjut dan makin panjang usia harapan hidup sebagai akibat yang telah dicapai dalam pembangunan selama ini, maka kesejahteraan penduduk usia lanjut yang karena kondisi fisik dan atau mentalnya menurun perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah dan masyarakat. Sesuai Pola Dasar Pembangunan bidang kesejahteraan sosial disebutkan, "Orang tua dalam keadaan lanjut usia dengan sendirinya akan mendapat tempat yang harus dihormati dan dibahagiakan". (Dep.Sos., 1984: 97). Pe-

- 1). Harian Kedaulatan Rakyat, "Peranan Otak dan Mudah Lupa pada Lanjut Usia," Sabtu 20 Januari 1996, p.8.
- 2). Djamaludin Ancok, "Kondisi Demografi Manula di Yogyakarta," Kantor Menteri Negara KLH., Lampiran, p.1.
- 3). Hasil Seminar Sehari, "Menyongsong Struktur Penduduk Usia Lanjut Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta", Juli 1992, p.3.

ningkatan jumlah penduduk berusia lanjut tentu menimbulkan tantangan baik bagi keluarga, masyarakat maupun pemerintah. Karena pada saat sekarang kehadiran penduduk usia lanjut dalam keluarga akan memberi corak dan warna yang berbeda dibandingkan pada masa lalu, hal ini terutama disebabkan oleh perubahan ciri dan struktur keluarga pada masa lalu, umumnya keluarga-keluarga Indonesia berbentuk keluarga luas (extended family) yang terdiri dari generasi kakek-nenek, ayah-ibu, dan anak-anaknya. Pada masa kini dan masa yang akan datang, menjadi keluarga batih (nuclear family) dengan anggota yang kecil, yang umumnya terdiri dari dua generasi yaitu ayah-ibu dan anak-anak saja. 4) Dalam perubahan ini membawa dampak pada kehidupan berkeluarga bagi penduduk usia lanjut.

Pada masa saat ini umumnya setelah dewasa berkeluarga mereka segera memisahkan diri dari orang tuanya, sehingga sejak awal orang tua tidak terbiasa tinggal bersama anggota keluarga anaknya.

Masalah lain yang dialami keluarga dengan meningkatnya jumlah penduduk usia lanjut adalah masalah ekonomi. Bagi keluarga tingkat ekonomi menengah ke atas tidak mengalami banyak masalah, karena mereka mampu mencukupi kebutuhan pokoknya

4). Dep.Sos. RI., "Program Penyantunan Pelayanan Sosial Lanjut Usia Repelita VI," Jakarta, 1995, p.6.

seperti pangan, sandang, papan dan kesehatannya. Bagi keluarga ekonomi kelas menengah ke bawah atau keluarga miskin, jelas menimbulkan masalah.

Di satu sisi sesuai dengan budaya bangsa kita, masyarakat sangat menghargai orang tua. Dalam keadaan tertentu disebabkan oleh ketidakmampuan keluarga dalam segi ekonomi menyebabkan mereka tidak mampu merawat orang tua yang sudah lanjut usia tersebut, maka tidak terlepas kemungkinan bahwa si "lanjut usia" akan mendapat masalah kehidupannya dalam menapak sisa hidupnya, dan bahkan bisa menimbulkan berbagai kondisi-kondisi yang jauh dari standard hidup baik kesehatan maupun kejiwaan. Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial dalam Bab I pasal 1 dinyatakan "Setiap warga negara berhak atas taraf hidup kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya dan berkewajiban untuk sebanyak mungkin ikut serta dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial," Hal serupa juga termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2 menyebutkan:

"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Mengacu pada kedua Undang-Undang tersebut, maka keberadaan wadah bagi lanjut usia baik yang dikelola pemerintah maupun swasta semakin diperlukan untuk memberikan fasilitas pelayanan kepada lanjut

usia secara layak agar tidak terlantar dan dapat tenang menjalani sisa hidupnya.

Diharapkan pelayanan dalam wadah lanjut usia tersebut mencakup aspek-aspek kehidupan dan penghidupan sehari-hari sebagai manusia.

Wadah pelayanan lanjut usia hendaknya merupakan "Treatment Centre" atau tempat di mana penerima pelayanan dapat dibantu mengatasi permasalahan yang dideritanya. Karena itu semua pelayanan di dalamnya harus dirancang sedemikian rupa untuk semaksimal mungkin memberikan pemecahan masalah yang diderita penerima pelayanan (Arthur E, Fink, 1964; 207). Menurut Howarg W Hopkrik dalam bukunya *Institutions Serving Ing Children* memberikan gambaran sebuah wadah pelayanan lanjut usia yang modern, yaitu wadah yang diselenggarakan bagi penerima pelayanan, yang di dalam hunian tersebut dibangun pula perumahan-perumahan keluarga yang dikenal "Cottage Plan", di samping itu disediakan pula kamar-kamar, kelompok-kelompok kecil terdiri dari 3 sampai 4 penerima pelayan (Howarga W. Hopkrik, 1966). Adapun menurut Walter A Freddlander, wadah pelayanan lanjut usia harus merupakan tempat di mana penerima pelayanan dapat memperoleh cara hidup yang baru dalam kehidupan bersama rekan-rekannya, memperoleh pengalaman diri hidup berkelompok, memperoleh pemeliharaan kesehatan yang baik, memperoleh tambahan makanan yang bergi-

zi, memperoleh suasana persahabatan, memperoleh pendidikan pelatihan, yang kesemuanya itu diberikan oleh tenaga-tenaga profesional seperti instruktur, ahli ilmu jiwa/psikolog, dokter atau perawat, dan pekerja sosial.

Dalam istilah pelayanan yang digunakan mencakup seluruh pengertian di atas. Terlepas dari bagaimana bentuk wadah yang digunakan, maka wadah pelayanan kesejahteraan sosial mencakup kebutuhan hidup sehari-hari dan merupakan "tempat penyembuhan". Wadah pelayanan lanjut usia yaitu merupakan unit pelaksanaan teknis di bidang Pembinaan penampungan, jaminan hidup seperti makan dan pakaian, pemeliharaan kesehatan, pengisian waktu luang termasuk rekreasi, bimbingan sosial, mental serta agama, sehingga mereka dapat menikmati hari tuanya dengan diliputi ketentraman sosial.

2. Eksistensi dan Problematika Lanjut Usia Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan memperhatikan jumlah lanjut usia secara nasional maupun regional yang semakin meningkat, maka diperlukan tindakan antisipasif yang lebih serius dalam menanganinya. Kebutuhan adanya fasilitas umum sebagai wadah pelayanan dan perawatan orang lanjut usia di daerah Istimewa Yogyakarta bukan lagi dilihat secara apriori dari program pemerintah saja akan tetapi juga ditinjau

dari perkembangan untuk tahun-tahun mendatang di mana kebutuhan wadah pelayanan dan perawatan yang layak bagi lanjut usia perlu ditingkatkan baik dari segi kuantitas maupun kualitas pelayanannya, berikut data-data yang signifikan atas dasar:

Tabel i . Luas daerah yang terhuni dan tak terhuni menurut Kabupaten/Kotamadya di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

No.	Kabupaten/ Kotamadya	Luas Daerah Terhuni (Ha)	Luas Daerah Tak Terhuni/ Pertanian (Ha)	Jumlah Total (Ha)
	(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kulon Progo	47,809	10,818	58,627
2.	Bantul	33,767	16,918	50,685
3.	Gunung Kidul	140,205	3,331	148,536
4.	Sleman	32,205	24,830	57,482
5.	Yogyakarta	2,996	254	3,250

Sumber data: Daerah Istimewa Yogyakarta dalam angka 1994

Tabel ii : Banyaknya lanjut usia terlantar dan kepadatan penduduk menurut Kabupaten/Kotamadya di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 1994/1995.

No.	Kabupaten/ Kotamadya	Jumlah Lanjut Usia Terlantar (Org)	Jumlah lanjut usia tertangani/ di panti (Org)	Kepadatan Pendu- duk (Per)	
				Km ²	Ha
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kulon Progo	7,210	-	726,35	7,2635
2.	Bantul	6,738	50	144,08	1,4408
3.	Gunung Kidul	9,511	-	485,16	4,8516
4.	Sleman	4,026	98	1363,14	13,6314
5.	Yogyakarta	2,576	120	14209,23	142,0923

Sumber Data: Kanwil Dep.Sos.
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Dari kedua tabel I dan II tersebut, dapat dikaitkan untuk mendapatkan angka ratio/perbandingan lanjut usia di masing-masing tingkat kabupaten/kotamadya.

- a. Per. Kab . $\frac{\text{Jumlah lanjut usia (Org)}}{\text{Luas Daerah ter huni (Ha)}} = \dots\dots \text{Org/Ha}$
 b. Luas daerah-luas pert. = luas daerah ter huni (Ha)

Tabel iii : Angka Ratio/Perbandingan masing-masing Kabupaten/Kotamadya di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

No.	Kabupaten/ Kotaadya	Luas daerah (Ha)	Hunian (Ha)	Kepadatan Pen-		Jumlah Lanjut usia terlantar (Org)	Jumlah lanjut usia tertang- ani/di panti (Org)	Jumlah lanjut usia tak ter- tangani/sisa	Org/Ha
				Km ²	Ha				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Kulon Progo	58,627	47,809	726,35	7,26	7,210	-	7,210	0,150
2.	Bantul	50,685	33,767	144,08	1,44	6,738	50	6,688	0,199
3.	Gunung Kidul	148,536	140,205	485,16	4,85	9,511	-	9,511	0,068
4.	Sleman	58,482	32,652	1363,14	13,63	4,026	98	3,928	0,123
5.	Yogyakarta	3,250	2,996	14209,08	142,08	2,579	120	2,459	0,860

Dari hasil ratio/perbandingan "lanjut usia terlantar" tabel III diambil kesimpulan bahwa di Kotamadya Yogyakarta menunjukkan angka yang tertinggi tingkat kepadatan penduduk per km²/Ha kolom (4-5) maupun jumlah lanjut usia Per Ha kolom (9) dibanding dengan kabupaten/kotamadya Kulon Progo, Bantul, Gunung Kidul dan Sleman. Tinjauan terhadap keberadaan tiga fasilitas pelayanan sosial yang ada di Kotamadya Yogyakarta.

**Tabel IV : Banyaknya Pelayanan Sosial dan Kapasitas
Tampung di Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta 1994/1995.**

No.	Nama Panti Tresna Werdha	Alamat	Nama Pimpinan	Status PTW :PEN/PEMDA/SWASTA:	KAPTA	K A P S I			Jumlah Panti/L.U. Yang Mendapat Subsidi						Status Pemilikan Tanah		
						L	P	JML	DEFSOS		PEMDA		DHARMAIS				
									P	LU	P	LU	P	LU			
1.	STW, Abiyoso	{Pakem, Sle- man.	{Kr. Soejarwati	Pemerintah	100	-	-	98	V	V	-	-	-	-	-	-	C
2.	SWT. Budi Luhur	{Kasongan, Bantul.	{Dra. Haningsih	Pemerintah	50	-	-	50	V	V	-	-	-	-	-	-	C
3.	PW. Budhi Dharma	{Kota Gede, Yogyakarta;	{Haryanto	Pemda	70	-	-	70	-	-	V	V	-	V	-	-	C
4.	PW. Hanna	{Surokarsan; MG.II/267	{Ny.S.Hadipra- yitno.	Swasta	30	-	-	27	V	V	-	-	-	V	-	-	C
5.	Prandan Pradudan	{Klitren, Yogyakarta;	{Swasta	Swasta	20	-	-	20	-	-	-	-	V	-	-	-	

Sumber Data: Kanwil Dep.Sos.
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Keterangan:

- KAPTA : Kapasitas Tampung - LU: Lanjut Usia
- KAPSI : Kapasitas Isi - C: Milik Badan Sosial
- P : Panti

1. PW. Budhi Dharma, kapasitas 70 orang

2. PW. Hanna, kapasitas tampung 30 orang

3. Prandan Pradudan, kapasitas 20 orang, maka total kapasi-
tas tampung 3 fasilitas sosial yang ada di Yogyakarta
sebanyak 120 lanjut usia. Jumlah lanjut usia terlantar di
Yogyakarta sebanyak 2.579 orang (tabel III. Kol.6) dan
jumlah tertangani 120 orang lanjut usia terlantar (tabel
III, kol. 7) sehingga yang tak tertangani masih 2.459
orang lanjut usia terlantar. Dengan demikian kebutuhan
fasilitas wadah pelayanan dan perawatan lanjut usia di
Yogyakarta mendesak dibutuhkan sebagai upaya pelayanan

kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar.

Secara umum fasilitas pelayanan sosial di Yogyakarta ditinjau dari prasarana dan sarana masih banyak memerlukan peningkatan yang secara keseluruhan diharapkan dapat memenuhi dan mendukung aktivitas/kegiatan yang ada dalam wadah pelayanan sosial lanjut usia tersebut.

Berawal dari fenomena dan permasalahan tersebut, ternyata cukup menarik untuk diangkat dan diamati permasalahan-permasalahan tentang wadah pelayanan dan perawatan lanjut usia serta mengkaji permasalahan di lingkungan lanjut usia. Dalam studi ini tema tersebut diangkat dengan pokok bahasan "Wisma Pelayanan dan Perawatan Lanjut Usia di Kotamadya Yogyakarta".

Dalam bahasan wadah pelayanan dan perawatan lanjut usia ini, sasaran garapan pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar adalah:

- 1). Pria/wanita yang berusia 60 tahun ke atas.
- 2). Kondisi kehidupannya terlantar, tidak mempunyai bekal

hidup, pekerjaan, penghasilan yang tetap, mereka juga tidak mempunyai sanak keluarga yang dapat menjamin hidupnya secara layak.

Tujuan batasan tersebut sesuai dengan Undang-Undang No.4 tahun 1965 tentang pemberian bantuan penghidupan orang jompo, mereka perlu mendapat perawatan/pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau badan-badan/organisasi swasta/perorangan. Untuk itu di berbagai tempat dibangun fasilitas sosial wisma pelayanan dan perawatan lanjut usia.

I.B. PERMASALAHAN

1. Permasalahan Umum

- a. Perlunya membangun wadah fisik guna menampung penyandang masalah sosial lanjut usia terlantar disertai kegiatan pembinaan dalam berbagai aspek kehidupan.
- b. Merencanakan lingkungan kehidupan baru yang dapat memberikan berbagai kegiatan sesuai dengan kondisi lanjut usia.

2. Permasalahan Khusus

- a. Bagaimana mengungkapkan bentuk dan pola susunan wadah fisik tempat penampungan sebagai pembinaan dan kehidupan para lanjut usia.
- b. Bagaimana tata ruang dan karakter ruang yang dapat mendukung terhadap kegiatan pelayanan dan sistem pengawasan yang bersifat perlindungan pada kelompok lanjut usia.

I.C. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan Pembahasan

Sebagai upaya studi alternatif atau peningkatan revisi studi wadah yang telah ada mengenai fasilitas pelayanan sosial dan pembinaan bagi lanjut usia dengan parameter ratio-ratio yang dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan di dalamnya.

2. Sasaran Pembahasan

Mengemukakan penyelesaian masalah mengenai wadah

pelayanan dan perawatan lanjut usia terlantar yang dapat mendukung berbagai kegiatan di dalamnya dan sesuai dengan kondisi usia yang telah lanjut.

I.D. LINGKUP PEMBAHASAN

1. Pembahasan ditekankan pada bangunan rehabilitasi kondisi "lanjut usia terlantar" serta fasilitas penunjang lainnya sehingga pelayanan kegiatan wadah lanjut usia secara keseluruhan merupakan kegiatan layanan yang mendukung.
2. Pembahasan dilakukan sesuai dengan kebutuhan untuk menjawab permasalahan yang ditekankan hal-hal di luar lingkup permasalahan apabila dianggap mendasari dan menentukan faktor-faktor perancangan akan dibahas dengan asumsi, hipotesa dan logika sesuai dengan kemampuan yang ada.

I.E. METODE PEMBAHASAN

Metode yang dipakai untuk memecahkan masalah adalah dengan metode analisa sintesa yaitu dengan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan maupun unsur-unsur yang mendukung tujuan. Mengelompokkan dan mengkaitkan serta menghubungkan antar permasalahan dengan faktor penentu dan penunjang sasaran pembahasan.

I.F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Bab I : Pendahuluan

Mengemukakan latar belakang permasalahan, tujuan dan sasaran, lingkup pembahasan,

metode pembahasan dan sistematika pembahasan.

Bab II : Tinjauan Lanjut Usia dan Permasalahannya.

Mengemukakan tentang pengertian lanjut usia, kondisi fisik, psikis dan sosial lanjut usia serta permasalahan yang dihadapi pada lanjut usia.

Bab III : Mengemukakan keberadaan, persepsi sebuah wisma lanjut usia sebagai fasilitas pelayanan dan perawatan serta pembinaan kondisi lanjut usia terlantar.

Bab IV : Analisis terhadap faktor-faktor penentu perencanaan dan perancangan. Menguraikan berbagai landasan wadah pelayanan lanjut usia sebagai fasilitas pelayanan dan perawatan serta pembinaan kondisi lanjut usia sebagai perumusan pendekatan konsep perencanaan dan perancangan.

Bab V : Menentukan Konsep Perencanaan dan Perancangan yang merupakan kesimpulan akhir dari pendekatan konsep perencanaan dan perancangan untuk mendasari transformasi desain fisik.